PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG KADALUARSA (STUDI KASUS: PUTUSAN PERKARA NOMOR 870/PID.B/2009/PN.JKT.UT)

Alexandro P Simorangkir, Rd. Yudi Anton Rikmadani

*Universitas Insan Pembangunan Indonesia , Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof Gayus
Lumbuun ; yudianton@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mempelajari dan menganalisis elemen-elemen Tindak Pidana serta Pelaku Usaha sebagai Subyek Hukum dalam konteks Penerapan Pasal 8 ayat (1) Huruf g dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan Putusan Perkara Nomor 870/PID. B/2009/PN. JKT. UT. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim saat mengambil keputusan dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan berbasis studi kasus. Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup putusan hakim, kasus yang akan dianalisis, peraturan perundang-undangan, referensi (literatur), dan jurnal ilmiah yang relevan, serta data dari artikel berita. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari informasi di internet yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Semua data yang terkumpul akan disusun dan dianalisis dengan merujuk pada teori atau pandangan dari para ahli. Selanjutnya, teori ini akan dihubungkan dengan alasan atau pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim dalam memberikan keputusan. Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa para hakim dalam menangani perkara-perkara tindak pidana perlindungan konsumen harus memiliki pengetahuan tentang sistem hukum yang lebih baik lagi dan bukan hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada dakwaan jaksa penuntut umum semata sehingga hakim-hakim yang menangani perkara-perkara tindak pidana perlindungan konsumen dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan yang lebih baik lagi.

Kata kunci: *ratio decidendi* ; Perlindungan Konsumen ; Pelaku Usaha ; Kejahatan Konsumen.

Abstract

*This research aims to study and analyze the elements of Criminal Acts and Business Actors as Legal Subjects in the context of the Application of Article 8 paragraph (1) Letter g of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection related to the Decision in Case Number 870/PID. B/2009/PN. JKT. UT. Based on this, the author aims to examine the factors considered by judges when making decisions in criminal cases related to consumer protection. This research applies a normative juridical method with a case study-based approach. The legal sources used in this study include judges' decisions, the cases to be analyzed, laws and regulations, references (literature), relevant scientific journals, and data from news articles. The data collection process is carried out by searching for information on the internet related to the topic discussed. All collected data will be compiled and analyzed with reference to theories or expert opinions. Furthermore, this theory will be linked to the legal reasoning or considerations (*ratio decidendi*) used by judges in rendering decisions. The results of this study conclude that judges handling consumer protection criminal cases must have a better knowledge of the legal system and not only base their legal considerations on the public prosecutor's indictment alone, so that judges handling consumer protection criminal cases can provide better legal considerations and decisions.*

Keywords : *Ratio Decidendi ; Consumer Protection ; Business Actors ; Consumer Crimes*

1. Pendahuluan

Salah satu sasaran dari pembangunan di Indonesia adalah untuk memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia,¹ baik secara fisik maupun rohani, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dasar; pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang layak. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, yang berarti memberikan akses pendidikan yang merata kepada seluruh warga. Kesejahteraan dan kecerdasan ini adalah hasil dari pembangunan yang berfokus pada kemanusiaan sesuai dengan prinsip Pancasila, yang diakui sebagai pedoman dan ideologi Negara Indonesia serta Undang-Undang Dasar 1945.²

Melihat karakter manusia yang beraneka ragam, sering kali muncul kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan di antara anggota masyarakat. Salah satu aturan yang dibutuhkan oleh manusia adalah aturan hukum yang mengatur interaksi antar individu untuk mencapai kedamaian dengan harmoni antara ketertiban dan ketenteraman. Aturan adalah standar atau ukuran serta pedoman untuk bertindak atau berperilaku dalam kehidupan.³

Dalam interaksi sosial terdapat berbagai jenis relasi antara individu di dalam masyarakat, yaitu relasi yang muncul karena kepentingan masing-masing individu.⁴ Dalam interaksi sosial terdapat berbagai jenis relasi antara individu di dalam masyarakat, yaitu relasi yang muncul karena kepentingan masing-masing individu. Dengan adanya beragam jenis interaksi tersebut, para individu di dalam masyarakat memerlukan hukum-hukum yang dapat memastikan adanya keseimbangan sehingga hubungan-hubungan ini tidak menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat.⁵

Peraturan yang berlaku harus diikuti oleh masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi dengan baik karena tujuan dari hukum (*ius constituendum*) dapat tercapai dengan tepat serta sebaliknya. Oleh sebab itu, setiap undang-undang yang dibuat harus sejalan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat, di mana nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu dituangkan ke dalam peraturan hukum untuk menghindari adanya diskriminasi di dalam masyarakat.

Era globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika saat ini telah mempercepat proses peredaran suatu barang dan/atau jasa yang beragam bentuk serta jenisnya antar

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea Keempat.

² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet. 2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 1.

³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 6.

⁴ C. S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jilid I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal.13.

⁵ *Ibid*

*Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Kadaluarsa
(Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor 870/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Ut)*

negara maju ataupun berkembang seperti Indonesia selalu yang dibanjiri oleh barang (produk) dari luar negeri. Kondisi yang demikian, terutama bagi konsumen memberikan lebih banyak pilihan sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen.⁶

Tetapi setelah barang yang dibeli oleh konsumen tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka konsumen tidak berdaya untuk menuntut, dan atau bahkan konsumen tidak mengetahui kepada siapakah konsumen harus mengadu. Apabila konsumen mengadukannya kepada pihak kepolisian maka aduannya tidak dapat dijadikan perkara, karena dianggap tidak ada perangkat hukum atau undang-undang yang mengatur dan dapat melindungi konsumen, bahkan dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri sekalipun hasilnya sudah dapat ditebak bahwa konsumen akan selalu kalah.

Kondisi dan fenomena yang telah disebutkan di atas bisa menyebabkan posisi antara pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, sehingga konsumen sering berada dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Mereka menjadi sasaran dalam aktivitas bisnis yang bertujuan untuk meraih keuntungan maksimal oleh para pelaku usaha melalui strategi pemasaran, metode penjualan, dan penggunaan perjanjian standar yang merugikan bagi konsumen. Di tengah situasi perdagangan bebas, konsumen berpotensi besar menjadi korban karena masyarakat masih belum sepenuhnya bersiap untuk menghadapi perubahan tersebut. Oleh karena itu, pelaku usaha diharuskan untuk terus meningkatkan kualitas produk mereka sekaligus bertanggung jawab atas setiap barang yang mereka hasilkan.⁷

Dengan demikian diperlukan undang-undang yang dengan secara tegas melindungi konsumen dari pelaku usaha yang mengejar keuntungan semata, tanpa memperhatikan hak-hak dari konsumen ataupun juga bagi pelaku usaha agar terlindungi dari konsumen yang tidak beritikad baik. Maka pada tanggal 20 April Tahun 1999 diundangkanlah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan masa sosialisasi selama satu tahun dan efektif pada tanggal 20 April Tahun 2000.

Prinsip dari pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang seminimal mungkin, terkadang sering merugikan konsumen secara langsung maupun tidak langsung yang mana hal tersebut dapat terlihat melalui barang yang dijual dimasyarakat ternyata sudah tidak layak lagi untuk digunakan atau dikonsumsi karena sudah lewat masa waktu penggunaannya atau "*kadaluarsa*".

⁶ Rd. Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Telematika, Dasar-Dasar Aspek Perdata Dan Aspek Pidana*, (Bandung: Mujahid, 2018), hal. 1.

⁷ NHT Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Pertanggungjawaban Produk*, (Jakarta: Panta Rei 2005), hal.18..

*Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Kadaluarsa
(Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor 870/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Ut)*

Mengenai barang yang kadaluarsa telah diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf g yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang; “tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”.⁸ Makna dari penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf g tersebut diatas terdapat dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik adalah terjemahan dari kata “best before” yang biasa digunakan dalam label produk makanan”.⁹ Namun untuk barang yang telah tertera secara lengkap perihal kadaluarsa sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidaklah melindungi konsumen dari kadaluarsa barang secara fisik sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 9 ayat (1) huruf b yang berbunyi: *Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah; “barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru”*.¹⁰

Sanksi pidana terhadap kedua pasal tersebut diatas diatur secara jelas di dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”¹¹

Sanksi pidana yang berlaku didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diterapkan secara komprehensif dalam pelaksanaannya sehingga tercipta kepastian hukum. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.¹² Pelanggaran terhadap sanksi pidana di dalam UUPK yang terproses sampai pengadilan akan menghasilkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 8 ayat (1) huruf g.

⁹ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf g

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (1) huruf b.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 62 ayat (1).

¹² S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Cet. 1, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), hal.29.

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”¹³

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Unsur-unsur Tindak Pidana dan Pelaku Usaha sebagai Subyek Hukum terhadap Penerapan Pasal 8 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Atas Putusan Perkara Nomor 870/PID.B/2009/PN.JKT.UT Dalam Perkara Barang Kadaluarsa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah aktivitas ilmiah yang dilakukan dengan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami satu atau lebih fenomena hukum khusus melalui analisis yang mendalam.¹⁴ Sesuai dengan pemahaman yang telah dijelaskan, metode yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan hukum ini adalah metode normatif yuridis dengan pendekatan analisis kasus. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan berbasis kasus dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, yang telah menjadi keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang final. Fokus utama dalam pendekatan berbasis kasus adalah rasio decidendi atau alasan yaitu pertimbangan yang digunakan pengadilan untuk mencapai sebuah keputusan.¹⁵

3. Pembahasan

3.1. Sejarah, Sifat, Serta Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

A. Sejarah Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perkembangan ekonomi yang cepat telah menciptakan berbagai macam produk dan/atau layanan yang dapat digunakan oleh konsumen. Produk dan/atau layanan tersebut biasanya adalah barang dan/atau jasa yang sejenis atau yang saling melengkapi. Dengan bertambahnya variasi produk yang semakin luas dan didukung oleh kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, terlihat jelas adanya perluasan dalam transaksi produk dan/atau layanan yang ditawarkan dengan cara yang beragam, baik yang dihasilkan dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.

Perkembangan yang terjadi ini, di satu sisi, memberikan keuntungan bagi pembeli karena mereka bisa mendapatkan barang dan/atau layanan yang

¹³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 193 ayat (1)

¹⁴ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 43.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 94.

*Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Kadaluarsa
(Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor 870/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Ut)*

mereka inginkan, serta semakin banyaknya pilihan dan kebebasan untuk memilih berbagai jenis dan kualitas barang dan/atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Namun, di sisi lain, kondisi dan fenomena ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, di mana posisi konsumen menjadi lemah. Pembeli menjadi sasaran kegiatan bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimum oleh pelaku usaha melalui strategi pemasaran, metode penjualan, dan kontrak standar yang merugikan konsumen.¹⁶ Hal ini bukan hanya masalah yang terbatas di suatu wilayah, tetapi telah menjadi isu global yang mempengaruhi semua konsumen di seluruh dunia. Munculnya kesadaran di kalangan konsumen telah mendorong terciptanya salah satu bidang baru dalam hukum, yaitu hukum Perlindungan Konsumen yang juga dikenal sebagai hukum konsumen.

Hukum Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum yang bersifat umum. Banyak elemen di dalamnya dipengaruhi oleh hukum dari negara lain, tetapi jika diteliti dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, ternyata prinsip-prinsip yang mendasari sudah ada sejak lama, termasuk hukum adat.¹⁷ Pada awal tahun 1990-an, usaha untuk menciptakan undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen dilakukan lagi. Ciri khas pada periode ini adalah bahwa pemerintah, khususnya Departemen Perdagangan, telah menyadari pentingnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini terlihat dari dua draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang pertama merupakan hasil kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, dan yang kedua adalah hasil kolaborasi dengan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. Namun, pada akhirnya, kedua draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut tidak mendapat pembahasan di DPR.

Pada akhir tahun 1990-an, tidak hanya organisasi konsumen dan Kementerian Perdagangan yang memperjuangkan UUPK, tetapi juga karena adanya tekanan dari lembaga keuangan dunia, yaitu IMF (Dana Moneter Internasional). Desakan dari IMF inilah yang mendorong terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Keberadaan UUPK menandakan kebangkitan hak-hak sipil masyarakat, karena pada dasarnya hak konsumen adalah bagian dari hak sipil masyarakat. Undang-undang Perlindungan Konsumen juga merupakan penjabaran yang lebih rinci mengenai hak asasi manusia, khususnya mengenai hak ekonomi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah

¹⁶Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal.11-12.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 2.

diresmikan sejak 20 April 2000. Meskipun undang-undang ini berjudul mengenai perlindungan konsumen, isi yang dibahas lebih banyak terkait dengan pelaku bisnis dengan maksud untuk menjaga kepentingan konsumen. Hal ini dikarenakan kerugian yang sering dialami oleh konsumen umumnya disebabkan oleh tindakan pelaku bisnis, sehingga perlu adanya pengaturan untuk melindungi konsumen dari kerugian tersebut.

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua area hukum yang saling terkait dan sulit untuk dipisahkan. Hukum perlindungan konsumen adalah subbagian dari hukum konsumen yang berisi prinsip-prinsip atau norma-norma yang bersifat mengatur dan juga mencakup perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Di sisi lain, hukum konsumen merujuk pada keseluruhan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang mengatur hubungan serta permasalahan antara pihak-pihak yang berbeda terkait dengan barang dan/atau jasa dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸

B. Sifat Undang-Undang Perlindungan Konsumen

- a. UUPK memberikan perlindungan kepada konsumen sejak pelaku usaha mendirikan usahanya di wilayah Negara Hukum Republik Indonesia, dimana pelaku usaha wajib memiliki izin usaha, izin industri (bila industri) beserta kelengkapannya dan ketentuan standar yang telah diatur peraturan perundang-undangan atas barang-barang yang diproduksi hal ini merupakan awal dari legalitas usaha dan industri. Dengan demikian usaha atau industri tersebut legal, sehingga produknya adalah legal bila ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar produksi dan ketentuan-ketentuan lainnya dipenuhi. Disini kelihatan bahwa melindungi konsumen selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen berdiri sendiri, UUPK juga mengintegrasikan dengan undang-undang lain yang materinya melindungi kepentingan konsumen. Sehingga sifat perlindungannya sangat maksimal dan serius.
- b. Pada UUPK terdapat Bab VII tentang Pembinaan dan Pengawasan pada Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya dikeluarkan PP No. 58 Tahun 2001. Hal tersebut di atas dibuat guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, ini merupakan bentuk jaminan agar tercipta keseimbangan atau kesetaraan. Pada bagian pengawasan sesuai PP No 58 tahun 2001 pasal 7 yang berbunyi: "*Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan*

¹⁸ *Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 72.

*Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Kadaluarsa
(Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor 870/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Ut)*

peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya Masyarakat". Pengawasan oleh pemerintah mulai dari proses produksi sampai pada beredarnya barang. Pengawasan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan masyarakat hanya pada barang yang beredar. Disinilah letaknya perlindungan konsumen wajib diwujudkan bahwa pemerintah dan masyarakat serta LPKSM bersama-sama melindungi konsumen di Indonesia.

c. Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah mulai menyiapkan perangkat konstruksi birokrat, pada saat itu dibawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan dibentuklah Direktorat Perlindungan Konsumen, yang berada pada ruang lingkup Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Saat ini setelah dibentuk kembali Departemen Perdagangan, maka Direktorat Perlindungan Konsumen berada di bawah Kementerian Perdagangan.

Direktorat Perlindungan Konsumen mulai melakukan sosialisasi tentang pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan mulai dengan pembinaan ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), serta pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di beberapa kota besar. Namun apa yang dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Konsumen setelah 3 tahun UUPK tersebut berjalan, arahnya cenderung melenceng dari apa yang diinginkan oleh pembuat undang undang. Direktorat Perlindungan Konsumen seolah-olah mendalilkan bahwa UUPK dapat dilaksanakan cukup hanya dengan dalil *primum remedium* dan *ultimum remedium*, yang artinya secara garis besar hanya melaksanakan hukum perdatanya saja terlebih dahulu, dengan proses penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang harus dilakukan penyelesaiannya secara perdata. Bila telah selesai dan disepakati oleh konsumen serta pelaku usaha, maka masalah hukumnya telah selesai.

Padahal apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak demikian. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebenarnya hukum pidana perlindungan konsumen juga diutamakan atau dalam beberapa hal tertentu bahkan menjadi absolut (mutlak) dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang tercantum di dalam UUPK yang terdapat pada Pasal 19 ayat (4) yang berbunyi: "*Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan*" ; Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi: "*Penyelesaian sengketa*

di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang"; dan Pasal 52 huruf d yang berbunyi: Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi: (d) "melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini". Adanya kesan tentang beratnya sanksi pada UUPK adalah demi tegaknya hukum perlindungan konsumen dan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sehingga tumbuh persaingan sehat antar pelaku usaha untuk mencapai bidang perekonomian nasional yang kuat.

3.2. Ketentuan Umum Tentang Konsumen Dan Pelaku Usaha

A. Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai "Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan". Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Sementara itu, definisi sesuai dengan UUPK di atas adalah setiap individu yang menggunakan barang dan atau jasa yang ada dalam masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, serta tidak untuk tujuan komersial.¹⁹ Sebelum adanya UUPK yang mulai diterapkan oleh pemerintah pada 20 April 2000, hampir tidak ada definisi normatif yang jelas mengenai konsumen dalam hukum positif di Indonesia. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR No. II/MPR/1993), istilah konsumen disebutkan saat membahas tujuan di bidang perdagangan, namun tidak ada penjelasan rinci mengenai istilah tersebut dalam ketetapan itu.

Di antara ketentuan normatif yang ada, terdapat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang mulai berlaku pada 5 Maret 2000, setahun setelah diundangkan). Undang-undang ini memberikan definisi mengenai konsumen sebagai individu yang memanfaatkan dan menggunakan barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk pihak lain. Definisi ini secara umum memiliki kesamaan dengan pengertian yang diatur dalam UUPK.

Istilah yang sedikit mirip dengan konsumen adalah "pembeli" (kooper). Istilah ini ditemukan dalam Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Definisi konsumen lebih spesifik dan lebih luas dibandingkan pembeli. Para ahli hukum konsumen di Belanda, seperti yang dikutip oleh tim FH UI dan

¹⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung : Nusa Media, 2010), hal. 30.

*Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Kadaluarsa
(Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor 870/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Ut)*

Depdagri, menyatakan bahwa mayoritas ahli hukum sepakat mendefinisikan konsumen sebagai pemakai akhir dari barang dan/atau jasa. Melalui definisi tersebut, Hondius berusaha membedakan antara konsumen yang bukan pemakai akhir dan konsumen yang merupakan pemakai akhir. Pemahaman mengenai istilah "konsumen" akan semakin jelas jika dilakukan perbandingan dengan beberapa negara yang telah menerapkan perlindungan konsumen yang memadai dalam sistem hukumnya.

Di Prancis, menurut doktrin dan hukum yang ada, konsumen dipahami sebagai "Orang yang membeli barang dan jasa untuk kepentingan pribadi atau keluarga". Dari pengertian ini terdapat dua komponen, yaitu (1) konsumen hanya adalah individu, (2) barang atau jasa yang dipakai untuk kebutuhan pribadi atau keluarganya.²⁰ Undang-Undang Perlindungan Produk di AS yang terdapat dalam Magnusson-Moss Warranty, Federal Trade Commission Act 1975, memiliki pengertian yang serupa dengan ketentuan di Prancis, begitu juga dengan uraian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (NBW Buku VI, Pasal 236). Meskipun terdengar lebih umum (karena dicantumkan dalam bab mengenai syarat-syarat umum perjanjian), substansinya tetap hampir identik. Dalam New Burgelijk Wetboek (NBW), konsumen didefinisikan sebagai individu. Artinya, saat melakukan kesepakatan, mereka tidak bertindak sebagai seseorang yang menjalankan suatu profesi atau bisnis.²¹

Di Spanyol, istilah konsumen mencakup bukan hanya individu (orang), tetapi juga perusahaan yang berfungsi sebagai pembeli atau pengguna akhir. Menariknya, di sini, konsumen tidak perlu terikat dalam suatu transaksi jual beli, sehingga konsumen tidak selalu sama dengan pembeli.²² Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1986, No. 68 di India menyatakan bahwa Konsumen adalah setiap individu (pembeli) yang membeli barang berdasarkan kesepakatan, yang berkaitan dengan harga dan metode pembayaran, namun tidak mencakup mereka yang memperoleh barang untuk tujuan dijual kembali atau keperluan bisnis lainnya.²³

Di Australia, aturannya jauh lebih santai. Dalam Undang-Undang Praktik Perdagangan 1974, yang telah mengalami beberapa perubahan, konsumen didefinisikan sebagai: individu yang membeli barang atau jasa tertentu dengan syarat harga tidak lebih dari 40.000 Dollar Australia. Ini berarti, asalkan tidak melewati jumlah uang tersebut, alasan pembeli barang atau jasa itu tidak

²⁰ Tim FH UI & Depdagri, *Rancangan Akademik Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, 1992), hal. 57.

²¹ Nasution, Op. Cit., hal. 72.

²² Tim FH & Depdagri, Op.Cit, hal. 58.

²³ Nasution, Loc. Cit

*Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Kadaluarsa
(Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor 870/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Ut)*

menjadi masalah. Namun, jika jumlah uangnya sudah lebih dari 40.000 Dollar, tujuannya harus spesifik.²⁴

Ada beragam definisi dan penjelasan tentang konsumen, yaitu menurut:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumen dijelaskan sebagai:²⁵ pemakai produk-produk yang dihasilkan oleh industri (seperti pakaian, makanan, dan lain-lain). Juga dijelaskan sebagai pihak yang menerima informasi dari iklan.
- b. Dalam Tata Krama dan Tata Cara Periklanan di Indonesia, konsumen diartikan sebagai pengguna barang atau penerima informasi dari iklan.
- c. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Butir 2, konsumen diartikan sebagai individu yang menggunakan barang dan/atau layanan yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya yang diperdagangkan.

Pengertian konsumen secara umum seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mencakup beberapa unsur berikut ini, yaitu:

- a. Individu yang menggunakan barang atau layanan.
- b. Menggunakan barang dan/atau layanan untuk kebutuhan sehari-hari.
- c. Bukan untuk dijual kembali atau sebagai pengguna akhir.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa. Arti dari istilah konsumen dapat bervariasi, tergantung pada konteks dan kepentingannya. Pengertian tentang konsumen tersebut di atas memiliki batasan-batasan tentang konsumen yang antara lain:

- a. Konsumen mencakup setiap individu yang menerima barang dan/atau layanan yang mereka pakai untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara merujuk pada setiap individu yang menerima barang dan/atau layanan dengan tujuan untuk menghasilkan barang dan/atau layanan lainnya atau untuk dijual kembali.
- c. Konsumen akhir adalah setiap individu yang memperoleh dan memanfaatkan barang dan/atau layanan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangga dan tidak berniat untuk menjual kembali (non-komersial).

²⁴ Steinwall & L.Layton, *Annotated Trade Practices Act 1974*, (Sydney: Butterworths, 1996), hal. 33-36.

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 458.

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan, konsumen adalah individu yang menggunakan barang dan jasa. Namun, istilah "individu" ini bisa menimbulkan pertanyaan, apakah itu hanya merujuk pada manusia sebagai individu atau juga mencakup entitas hukum. Menurut A. Z Nasution, yang dimaksud di sini adalah individu sebagai manusia, bukan entitas hukum. Sebab, yang mengonsumsi, menggunakan, atau memanfaatkan barang dan jasa untuk keperluan pribadi, keluarga, atau makhluk hidup lain tanpa tujuan untuk dijadikan komoditas hanyalah manusia.

B. Pelaku Usaha

Pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian Pelaku Usaha sebagai berikut: "Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

Penjelasan; "Pelaku usaha yang termasuk dalam definisi ini mencakup perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, pihak yang melakukan impor, pedagang, distributor, dan lain-lain. " Istilah pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK memiliki arti yang luas karena mencakup kegiatan grosir, distribusi, eceran, dan lain-lain. Luasnya cakupan definisi pelaku usaha dalam UUPK ini sejalan dengan definisi pelaku usaha di Masyarakat Eropa, khususnya di Belanda, di mana yang bisa diakui sebagai produsen mencakup: pembuat barang jadi; penyedia bahan baku; produsen suku cadang; individu yang memperkenalkan dirinya sebagai produsen dengan menyertakan namanya, tanda pengenal spesifik, atau simbol lain yang membedakan dari produk asli, pada produk tertentu; importir yang membawa produk dengan tujuan untuk dijual, disewakan, digunakan sewa (leasing), atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; dan pemasok, ketika identitas produsen atau importir tidak dapat diidentifikasi.

Pelaku usaha yang dijelaskan dalam UUPK serupa dengan pengertian produsen yang diatur oleh hukum Belanda, di mana produsen bisa berupa individu atau organisasi hukum. Dalam konteks pelaku usaha ini, tidak termasuk eksportir atau pelaku usaha dari luar negeri, karena UUPK menetapkan bahwa hanya individu atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum ataupun tidak, yang didirikan dan berkedudukan atau beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia yang dapat diterima.

*Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Kadaluarsa
(Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor 870/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Ut)*

Ada dua kategori pelaku bisnis menurut Sudaryatmo, yaitu individu dan kelompok usaha. Dalam hal advokasi konsumen, yang patut dijadikan “target” advokasi adalah pelaku bisnis yang berbentuk kelompok usaha. Sementara itu, pelaku bisnis individu, dalam praktiknya, sering kali muncul sebagai pengusaha kecil atau lemah, dan mereka juga termasuk dalam kelompok yang memerlukan perlindungan atau advokasi.²⁶

Dari rumusan pelaku usaha, ada kesan kuat UUPK melihat pelaku usaha sebagai sesuatu yang bersifat homogen. Padahal dalam realitas sangat heterogen. Hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam implementasi undang-undang tersebut di lapangan. Dari segi omset usaha, ada pelaku kecil, menengah sampai konglomerat. Apabila dalam implementasi UUPK tersebut dipukul rata, tidak hanya menguntungkan pelaku usaha besar, tetapi ada kekhawatiran juga akan semakin meminggirkan pelaku usaha skala menengah dan kecil yang sudah berada di pinggir. Dari segi sektor usaha, pelaku usaha juga tidak mungkin digeneralisasi. Luas dan kompleksitas sektor usaha tidak mungkin diatur secara seragam. Untuk kategori barang dan jasa mempunyai antara sesama sektor usaha di bidang jasa juga mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Hal ini perlu pengaturan yang juga sangat spesifik.²⁷

Pasal 1 butir 3 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Kalangan ekonomi (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) menyatakan bahwa aktor ekonomi bersamaan dengan pelaku bisnis terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:

- a. Kategori penyedia modal (investor)
- b. Kategori penghasil barang atau layanan (produsen)
- c. Kategori penyalur barang atau layanan (distributor)

Definisi pelaku bisnis seperti yang telah diuraikan di atas mencakup berbagai entitas seperti perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, dan pedagang, serta distributor.

²⁶ Sudaryatmo dan kawan-kawan, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta:YLBHI, 2006,) hal. 262-263.

²⁷ *Ibid*

3.3. Aspek-aspek Hukum dan Asas-asas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Hukum adalah sebuah keadaan, di mana individu-individu, yang secara alami berdiri sendiri, menggabungkan diri mereka dalam sebuah komunitas.²⁸ Hukum positif (*ius constitutum*) adalah kumpulan norma hukum yang efektif pada periode waktu tertentu. Periode yang dimaksud di sini adalah ketika ada suatu kejadian hukum yang spesifik. Dalam pengertian lain, hukum positif adalah hukum yang sedang diterapkan saat ini, berbeda dengan hukum yang ada di masa lalu atau hukum yang diharapkan di masa depan (*ius constituendum*).

Dalam pandangan aliran hukum positif, hukum yang ada saat ini harus memenuhi unsur keberlakuan yuridis. Meskipun boleh saja mengesampingkan aspek filosofis dan sosiologis, unsur yuridis tidak boleh diabaikan. Suatu peraturan dianggap memenuhi unsur keberlakuan yuridis jika peraturan tersebut dihasilkan oleh badan yang berwenang dan melalui prosedur yang benar. Oleh karena itu, hukum positif lebih menekankan pada formalitas, bukan pada isi atau materi peraturan itu sendiri. Istilah hukum positif digunakan karena hukum tersebut masih berlaku hingga kini. Hukum positif terdiri dari substansi hukum yang memiliki tiga unsur, yaitu (1) struktur, (2) substansi, dan (3) budaya hukum.

Menurut hukum positif di Indonesia, sumber hukum tertinggi terletak pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 27 ayat (1). Di dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang setara dalam hukum dan pemerintahan, serta berkewajiban untuk menghormati hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Pasal ini secara fundamental memberikan dasar hukum bagi perlindungan konsumen di Indonesia. Sebab dalam pasal tersebut jelas dinyatakan bahwa status hukum semua warga negara adalah sama atau setara (setara di hadapan hukum). Oleh karena itu, posisi hukum konsumen harus setara dengan produsen atau pemasar barang dari produsen. Mereka berhak untuk mendapatkan hak-hak yang seimbang antara satu dengan yang lainnya.

Aspek Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik karena mengatur interaksi antara individu dan masyarakat atau negara. Hukum ini diterapkan untuk kepentingan masyarakat dan hanya diberlakukan ketika masyarakat benar-benar membutuhkan.²⁹ Hukum pidana adalah sebuah sistem hukum yang memiliki sanksi khusus, dan berada di posisi yang berbeda, berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum pribadi serta hukum umum.³⁰ Peranan hukum

²⁸ Syaiful Bakhri, *Sejarah Pembaruan KUHP & KUHP*, Cet. 1, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hal.71.

²⁹ Mr. H.A. Zainal Abidi Farid, *Hukum Pidana I*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.4.

³⁰ Bakhri, *Op. Cit.*, hal. 72

*Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Kadaluarsa
(Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor 870/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Ut)*

pidana dalam perlindungan konsumen tampak dalam pelaksanaan prinsip-prinsip hukum dengan dua perspektif mengenai campur tangan hukum pidana di sektor hukum lainnya.

Pandangan Pertama, yaitu pandangan sebagai usaha terakhir. Berdasarkan pandangan ini, harus diupayakan agar seberapa sedikit mungkin tindakan dianggap sebagai tindak pidana dan apabila memang tidak bisa dihindarkan, terhadap tindakan yang telah ditentukan sebagai tindak pidana itu diberikan sanksi yang paling ringan.³¹

Pendapat mengenai pandangan awal tersebut diajukan oleh J. M. Van Bemmelen yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah suatu cara terakhir atau: "sebagai usaha terakhir untuk memperbaiki perilaku manusia dan sangat wajar jika masyarakat menginginkan agar dalam penerapan hukum pidana harus disertai dengan batasan yang seketat mungkin".³²

Pandangan yang disebutkan di atas juga disampaikan oleh Bambang Poernomo, yang dikutip sebagai berikut: "hukuman pidana adalah salah satu alat yang paling efektif dalam mengatasi kejahatan, tetapi hukuman bukan satu-satunya cara, sehingga jika diperlukan harus digabungkan dengan upaya sosial lain. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan prinsip '*ultimum remedium*' dan tidak menekankan prinsip '*primum remedium*'. "³³

Menurut H.G. Van De Bunt dalam buku *Bestuurlijke Verwachtingen en Ervaringen Omtrent de Strafrechtelijke Hanhaving Van Miliurecht*, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, terdapat tiga macam arti *ultimum remedium* antara lain:³⁴

1. Hukum pidana diterapkan hanya pada tindakan yang sangat menyimpang secara moral. Hukum pidana merupakan alat penegakan hukum yang khusus. Perlu dihindari agar hukuman tidak lebih berat daripada tindak pidana itu sendiri.
2. Secara harfiah, istilah *ultimum remedium* berarti solusi terakhir untuk suatu tindakan kriminal. Hukum pidana memiliki dampak yang dalam terhadap kehidupan pribadi terpidana, yang dapat berupa pencabutan kebebasan, prosedur penggunaan kekerasan, dan stigma. Oleh karena itu, penggunaannya

³¹ Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 116.

³² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 2, (Bandung : Sinar Baru, 1984), hal.16.

³³ Bambang Poernomo, *Manfaat Telaah Hukum Pidana Dalam Membangun Model Penegakan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 5 Juni 1989, dalam Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian (Ed.), *Membangun Hukum Indonesia Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, Maret 2008), hal. 182.

³⁴ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, hal. 69-70

*Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Kadaluarasa
(Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor 870/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Ut)*

perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Jadi, peran hukum pidana adalah sebagai alternatif terakhir.

3. Pejabat administrasi yang pertama kali harus bertanggung jawab untuk memberikan sanksi jika izin yang telah diberikan dilanggar. Kewenangan yudisial pejabat administrasi ini dianggap sebagai tindakan utama.

Pandangan yang kedua berkaitan dengan intervensi hukum pidana, yang berlawanan dengan pandangan yang pertama. Pendapat ini disebut *primum remedium*, yang menginginkan agar hukum pidana diterapkan dalam berbagai pelanggaran hukum yang sejauh ini biasanya diselesaikan melalui alat hukum administrasi negara dan hukum perdata.³⁵ Mewakili perspektif ini, Muladi secara teliti menyampaikan lima kriteria untuk penerapan hukum pidana sebagai berikut:³⁶

1. Situasi-situasi nyata yang berhubungan dengan tindakan yang dilakukan;
2. Aspek-aspek pribadi yang terkait dengan individu yang melakukan;
3. Dampak negatif yang disebabkan oleh tindakan yang terjadi;
4. Pandangan masyarakat mengenai kejahatan yang dilakukan; dan
5. Alat-alat lain yang berkaitan dengan tujuan dari hukuman.

Mengacu pada H. G. De Bunt dalam karyanya yang berjudul *Straafrechtelijke handhaving van millerecht*, hukum pidana berfungsi sebagai solusi utama jika ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:³⁷

1. Dampak yang ditimbulkan sangat signifikan.
2. Tersangka adalah orang yang pernah dihukum sebelumnya; dan
3. Kerugian yang dialami tidak dapat diperbaiki.

Dari sudut pandang kebijakan pidana (*criminal policy*) bahwa kriminalisasi norma-norma perlindungan konsumen tidak hanya bagi pengusaha individu, tetapi juga untuk perusahaan, telah muncul cara berpikir baru bahwa sanksi pidana digunakan bersamaan dengan sanksi hukum lainnya (*primum remedium*), bertentangan dengan pandangan bahwa hukum pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*). Kesan positif yang terlihat dari kebijakan pidana ini menempatkan hukum pidana sebagai salah satu alat untuk mendorong sikap bertanggung jawab di kalangan pelaku usaha, di samping alat hukum lainnya. Dari perspektif perlindungan hukum konsumen, hak-hak konsumen di Indonesia akan terjamin dengan adanya peran hukum pidana

³⁵ Shofie, Op. Cit., hal. 119.

³⁶ Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana di dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi*, makalah pada Seminar Kejahatan Korporasi diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 23-24 November 1989, hal. 5.

³⁷ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Cet.1, (Jakarta : Prenada Media, 2003), hal.33-36.

*Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Kadaluarasa
(Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor 870/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Ut)*

sebagai bagian dari hukum publik.³⁸

Meskipun ada dua pandangan yang berbeda mengenai penggunaan hukum pidana, keduanya sama-sama mengakui pentingnya menjaga kepentingan hukum konsumen dengan memberikan akuntabilitas pidana kepada tindakan-tindakan korporasi dari pelaku usaha yang berpotensi membahayakan keamanan dan keselamatan konsumen. Kejahatan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen termasuk dalam kategori kejahatan perusahaan (*corporate crime*), yang merupakan bagian dari kejahatan kelas atas (*white collar crime*) dan sering kali tidak dipandang sebagai suatu masalah kriminal yang besar oleh masyarakat umum. Terdapat empat alasan mengapa kejahatan ini tidak mudah terdeteksi, yaitu:³⁹

1. Pelanggaran yang terjadi terlihat kurang serius dan tidak terlalu mengancam jika dibandingkan dengan tindakan pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan;
2. Jenis pelanggarannya sering kali kurang terlihat secara langsung dibanding kejahatan lain yang berlangsung di tempat umum karena berlangsung di ruang kerja;
3. Hubungan antara korban dan pelaku bersifat tidak langsung; pada pelanggaran terkait keselamatan, pelaku tidak berniat untuk mencelakai atau membunuh korban jika situasi tersebut terjadi; dan
4. Jenis pelanggarannya sering kali berkaitan dengan isu-isu teknologi dan finansial yang rumit, sulit untuk dikenali oleh korban maupun lembaga penegak hukum.

Pengaturan hukum yang berlaku dalam bidang hukum pidana umumnya tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di Indonesia, penerapan kitab tersebut telah disatukan sejak tahun 1918, yaitu sejak diberlakukannya wetboek beberapa ketentuan yang menawarkan perlindungan hukum bagi konsumen, antara lain:⁴⁰

1. Pasal 204 KUHP “Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui membahayakan itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

³⁸ Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 250.

³⁹ Malcolm Davies, Hazel Croal dan Jane Tyrer, *Criminal Justice: An Introduction to Criminal Justice System in England and Wales*, (London, UK:Longmann, 1998), hal.58.

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno, Cet. 20, (Yogyakarta : Bumi Aksara, 1999), Pasal 204, Pasal 205, Pasal 359, Pasal 360, Pasal 382, Pasal 382 bis, Pasal 390, Pasal 383.

*Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Kadaluarsa
(Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor 870/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Ut)*

2. Pasal 205 KUHP “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurung paling lama satu tahun.
3. Pasal 359 KUHP “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun (LN 11906 No.1).
4. Pasal 360 KUHP “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Barang siapa dengan kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tigaratus rupiah.
5. Pasal 382 KUHP “Barangsiapa menjual, menawarkan, atau menyerahkan makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu palsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
6. Pasal 382 KUHP bis “Barangsiapa yang mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu diancam, jika karenanya dapat timbul kerugian bagi konkuren-konkuren orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
7. Pasal 383 KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang, terdapat pembeli: (1) karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli, (2) mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat”.
8. Pasal 390 KUHP “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang dagangan, dana-dana atau surat berharga menjadi turun atau naik, diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

3.4. Hasil Studi Putusan Nomor 870/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut

1. Kasus Posisi

Dalam menyusun karya tulis ini, penulis mengambil contoh kasus untuk membantu dalam menganalisis isu Kejahatan terhadap Perlindungan Konsumen. Kasus yang dipilih penulis adalah mengenai perkara pidana perlindungan konsumen dengan terdakwa Budi Wahyudi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bahwa Budi Wahyudi selaku Terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2008, dalam suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2008, berada di Super Market Carrefour Kelapa Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau di lokasi lain yang selaras dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan beberapa tindakan, yaitu memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau periode terbaik untuk menggunakan/memanfaatkan barang tertentu, yang berhubungan sedemikian rupa sehingga bisa dianggap sebagai tindak lanjut yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Menyatakan bahwa Budi Wahyudi yang menjadi Terdakwa, telah terbukti secara resmi dan meyakinkan melakukan pelanggaran hukum dalam "Tindak Pidana Bidang Perlindungan Konsumen" berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) bersama Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen serta Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menyatakan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus CP. Chiken (Ampela), tertulis dan terbaca pada kemasannya tanggal 03 September 2008;
2. 4 (empat) pcs Green Tea merk Shrimp, tertulis dan terbaca pada kemasannya tanggal 31 Agustus 2008;
3. 2 (dua) bungkus Krokot Daging Sapi, tertulis dan terbaca pada kemasannya bulan Juli 2008;
4. 4 (empat) kotak tepung Brownis merk Hershey's, tertulis dan terbaca pada kemasannya tanggal 2 September 2008.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf g UURI No. 8 Tahun

*Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Kadaluarsa
(Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor 870/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Ut)*

1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan;
3. Unsur beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Dalam menganalisa putusan pidana Nomor 870/PID.B/2009/PN.JKT.UT mengenai perkara Barang Kadaluarsa, maka penulis akan menganalisa dan menjabarkan pasal-pasal yang dijatuhkan oleh majelis hakim mengenai tindak pidana yang dimaksud. Selanjutnya, penulis akan menganalisa apakah penerapan pasal yang diberikan oleh majelis hakim sudah tepat terhadap perkara tindak pidana dalam putusan ini dan apakah pelaku usaha yang menjadi terdakwa dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan identifikasi masalah di atas.

Penerapan Pasal 8 ayat (1) huruf g UUPK dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara No: 870/PID.B/2009/PN.JKT.UT, adalah tidak tepat. Hal ini dikarenakan Pasal 8 ayat (1) huruf g UUPK membahas tentang larangan untuk menjual atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, sedangkan berdasarkan barang bukti sebagai fakta hukum di persidangan melalui putusan pengadilan menyatakan bahwa disebutkan kalimat tertulis dan terbaca tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsanya pada barang yang dijual, dan pada saat dijual sudah melewati tanggal yang sudah dicantumkan atau tertulis dan terbaca pada barang tersebut. Maka, penerapan pasal yang tepat menurut penulis adalah Pasal 21 huruf e Undang-Undang Pangan jo. Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 21 huruf e UU Pangan lebih memberikan kepastian hukum karena mengatur tentang larangan mengedarkan pangan yang sudah kadaluarsa". Dan didasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK yaitu: "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan." Maka sudah jelas pelaku usaha memperdagangkan barang (makanan yang sudah kadaluarsa) yang tidak memenuhi Pasal 21 huruf e UU Pangan jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK. Pelaku usaha yang menjadi terdakwa dalam putusan kasus tersebut sudah sesuai dengan pengertian pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen tetapi terdakwa

tidak hanya Budi Wahyudi (Store Manager) saja sebagai pelaku usaha, seharusnya PT. Carrefour Indonesia juga termasuk dalam pengertian pelaku usaha dan terdakwa dalam perkara ini, karena korporasi yang disebutkan dalam UUPK yaitu para pemegang saham, para direktur, manager, juga termasuk karyawan-karyawan didalamnya. Maka store manager juga termasuk pelaku usaha tetapi hanya kulit luarnya saja.

4. Kesimpulan

Para hakim dalam menangani perkara-perkara tindak pidana perlindungan konsumen harus memiliki pengetahuan tentang sistem hukum yang lebih baik lagi dan bukan hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada dakwaan jaksa penuntut umum semata sehingga hakim-hakim yang menangani perkara-perkara tindak pidana perlindungan konsumen dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan yang lebih baik lagi. Hakim dalam menerapkan pasal-pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum harus melihat dan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan dan dengan membandingkan secara teliti unsur-unsur pasal yang akan diterapkan sehingga, putusan yang dikeluarkan akan memiliki kepastian hukum dan keadilan dapat lebih ditegakkan secara baik dan benar. Pelaku usaha dalam menjalankan roda bisnisnya agar lebih berhati-hati agar jangan sampai faktor kelalaian dalam berbisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha mengorbankan konsumen sebagai pihak yang lemah.

5. Referensi

- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung : Nusa Media, 2010).
- Bambang Poernomo, *Manfaat Telaah Hukum Pidana Dalam Membangun Model Penegakan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 5 Juni 1989, dalam Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian (Ed.), *Membangun Hukum Indonesia Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*,(Yogyakarta: Kreasi Total Media, Maret 2008).
- C. S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jilid I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 193 ayat (1)
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Alinea Keempat.
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 8 ayat (1) huruf g.

*Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Kadaluarsa
(Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor 870/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Ut)*

- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet. 2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno, Cet. 20, (Yogyakarta : Bumi Aksara, 1999), Pasal 204, Pasal 205, Pasal 359, Pasal 360, Pasal 382, Pasal 382 bis, Pasal 390, Pasal 383.
- Malcolm Davies, Hazel Croal dan Jane Tyrer, *Criminal Justice: An Introduction to Criminal Justice System in England and Wales*, (London, UK:Longmann,1998).
- Mr. H.A. Zainal Abidi Farid, *Hukum Pidana I*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana di dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi*, makalah pada Seminar Kejahatan Korporasi diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 23-24 November 1989.
- NHT Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Pertanggungjawaban Produk*, (Jakarta: Panta Rei 2005).
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 2, (Bandung : Sinar Baru,1984).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, 1999).
- Rd. Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Telematika, Dasar-Dasar Aspek Perdata Dan Aspek Pidana*, (Bandung: Mujahid, 2018).
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Cet.1, (Jakarta : Prenada Media, 2003).
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Cet. 1, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM,1982).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).
- Steinwall & L.Layton, *Annotated Trade Opractises Act 1974*, (Sydney: Butterworths, 1996).
- Sudaryatmo, *Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen*, Cet. I, (Jakarta : PIRAC, 2001).
- Sudaryatmo, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2006).
- Syaiful Bakhri, *Sejarah Pembaruan KUHP & KUHP*, Cet. 1, (Yogyakarta : Total Media, 2011).
- Tim FH UI & Depdagri, *Rancangan Akademik Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, 1992).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

*Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Kadaluarsa
(Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor 870/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Ut)*

Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Cet. 1,
(Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008).

_____, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di
Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011).